

ABSTRAK

Pelindungan indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual tidak terlepas dari pertimbangan adanya nilai ekonomis yang melekat pada suatu produk. Penggunaan label atau tanda indikasi geografis menggambarkan adanya kualitas terhadap barang atau produk yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu. Salah satu negara yang memiliki fokus yang cukup baik pada sistem perlindungan dan tata kelola indikasi geografis adalah Italia sebagai negara anggota Uni Eropa. Mempelajari pengaturan Indikasi Geografis Italia dengan harapan dapat berkontribusi dalam pengaturan Indikasi Geografis Indonesia semakin baik kedepannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif analitis. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan indikasi geografis Italia sebagai negara anggota Uni Eropa memiliki suatu sistem yang lebih baik dalam hal menyelaraskan pengaturan dan tata kelola indikasi geografis bagi seluruh negara anggota lainnya. Indonesia dapat mempelajari banyak hal dengan pengaturan yang ada Italia, sebagai suatu negara kesatuan yang memiliki beberapa tingkat pemerintahan. Diharapkan Indonesia dapat menyelaraskan pengaturan mengenai Indikasi Geografis dan memperjelas sistematika tata kelolanya, sehingga masyarakat dapat menikmati dan memahami perlindungan hukum yang memiliki nilai ekonomis ini.

Kata kunci : Komparasi, Pengaturan Tata Kelola, Perlindungan Indikasi Geografis, Indonesia, Italia.

ABSTRACT

The protection of geographical indications as part of Intellectual Property Rights cannot be separated from the consideration of its economic value inherent in a product. The use of labels or geographical indications illustrates the quality of goods or products produced by a particular region. One of the countries that has a sufficiently good focus on the system of protection and governance of geographical indications is Italy, as a European Union member state. This research objective is to study the Italian regulation of Geographical Indications in hopes of contributing a better understanding to the regulation of Indonesia's Geographical Indication for the future.

This research used a normative juridical approach, namely research that is based on existing legal rules and also by looking at the facts that occur. The research specifications used in the form of descriptive analytical research. The research data comes from secondary data obtained through library studies and data analysis methods used are qualitative methods.

In this research, it can be concluded that the protection of geographical indications of Italy as an European Union member state has a better system in terms of harmonizing the regulations and governance of geographical indications for all other member countries. Indonesia can learn many things with existing regulation in Italy, as a unitary state that has several levels of government. It is hoped that Indonesia can harmonize the regulations regarding Geographical Indications and clarify the systematics of its governance, so that people can enjoy and understand the legal protection that has an economic value.

Keywords: Comparasion, Governance Arrangement, Protection of Geographical Indication, Indonesia, Italy.